

DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Kerangka Konsep	41
Gambar 2 Peta Kompleks Parlemen MPR/DPR RI	58
Gambar 3 Skema Pertukaran Sosial Langsung	80
Gambar 4 Skema Pertukaran Sosial Tidak Langsung	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Relevan.....	36
Tabel 2 Tahap Penelitian.....	46
Tabel 3 Tabel Informan.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	119
Lampiran 2 Dokumentasi Observasi dan Penelitian	121
Lampiran 3 <i>Curriculum Vitae</i>	125

DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN

SINGKATAN	KEPANJANGAN/ARTI
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
PKS	Partai Keadilan Sejahtera
KNIP	Komite Nasional Indonesia Pusat
RUU	Rancangan Undang-Undang
UU	Undang-Undang
NU	Nahdatul Ulama
DPP	Dewan Pimpinan Pusat
PPP	Partai Persatuan Pembangunan
PAN	Partai Amanat Nasional
Golkar	Golongan Karya
PDI	Partai Demokrasi Indonesia
PUTERA	Pusat Tenaga Rakyat
Volksraad	Dewan Rakyat masa Belanda
TA	Tenaga Ahli
ALEG	Anggota Legislatif

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang politik adalah berbicara tentang kekuasaan, kekuatan dan pengaruh (Baugut & Scherr, 2019). Oleh sebab itu politik banyak diasumsikan sebagai “*The process of who gets what, when, and how*” atau sebuah proses tentang “*Siapa yang mendapatkan apa, kapan dan di mana*”. Definisi sederhana lainnya mengartikan politik sebagai seni mempengaruhi orang lain (Budiardjo, 2007). Banyak sistem politik membuka ruang untuk melihat dan mengamati politik dari berbagai ragam sudut pandang, tak terkecuali dengan pendekatan sosiologi (Mawardi, 2019). Ketika sosiologi diposisikan sebagai optik dalam melihat politik, maka potret yang akan dihasilkan ialah berupa pola perilaku sosial atau model yang dianggap menjadi variabel penentu terciptanya sebuah sistem, struktur, dan fakta politik (Parsons, 1966). Politik itu sendiri memuat aksi atau tindakan yang secara langsung melibatkan penggunaan kekuasaan untuk membentuk upaya bersama dalam rangka menggapai tujuan bersama pula (Mawardi, 2019).

Sudijono Sastroatmodjo (1995) dalam Mighfar (2015) menyebutkan bahwa partai politik adalah salah satu komponen dari infrastruktur politik yang memiliki peranan yang cukup penting dalam arah kebijakan politik. Secara sosiologis, kehadiran partai politik merupakan sebuah manifestasi dari

eksistensi manusia yang memiliki sifat dasar untuk hidup bersama dengan orang lain, yakni hidup berkelompok. Manusia dalam kehidupannya hidup berkelompok karena selalu memiliki ketergantungan untuk hidup dengan orang lain. Dorongan interaksi mengarah pada interdependensi yang terdiri dari dua orang atau lebih sebagai perwujudan interaksinya. Kehidupan kelompok bersifat dinamis dan memiliki beragam ciri, tujuan, bentuk dan faktor latar belakang yang berbeda dalam proses terbentuknya. Dalam proses mencapai tujuan, sebuah kelompok akan melakukan interaksi yang dinamis. Interaksi yang berlangsung menjadi sebuah proses komunikasi demi mencapai tujuan yang dimana dalam proses tersebut terdapat unsur ganjaran dan imbalan, unsur-unsur tersebut dalam pandangan sosiologi muncul dalam teori pertukaran sosial (*Social Exchange Theory*) (Mighfar, 2015)

Teori pertukaran sosial merupakan salah satu pandangan sistematis yang mengasumsikan bahwa setiap tindakan dimulai karena individu menghitung nilai keseluruhan dari sebuah tindakan dan interaksinya dengan individu yang lain. Pertukaran sosial menjelaskan bahwa individu masuk ke dalam hubungan pertukaran karena dari padanya individu tersebut memperoleh imbalan. Menurut Geogre Homans salah satu pemikir teori pertukaran sosial dalam bukunya yang berjudul "*Elementary Forms of Social Behavior*" (1974), ia mengungkapkan secara eksplisit bahwa satu tindakan atau interaksi tertentu akan terus dilakukan secara berulang jika memiliki imbalan. Pada dasarnya semua jenis kelompok memiliki unsur imbalan dan ganjaran, namun hal tersebut akan lebih terlihat pada jenis kelompok partai politik dimana kelompok

ini terbentuk dengan kesadaran tujuan serta memiliki kepentingan pribadi maupun bersama yang diikat dalam sebuah organisasi formal (Unwanah, 2021).

Partai politik ialah sebuah kelompok yang terbentuk atas dasar kesadaran para anggotanya, memiliki tujuan, ideologi dan anggaran dasar yang jelas. Menurut UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Partai politik didefinisikan sebagai “*Organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum*”. Partai politik merupakan organisasi formal yang tergolong dalam organisasi sosial kepentingan yang dibentuk dengan kedudukan di posisi pusat (*political centrality*) dalam sebuah pemerintahan (Meyer, 2012). Partai politik memiliki peran yang vital dalam sistem negara demokrasi dengan memainkan peran sebagai penghubung yang sangat strategis di antara proses-proses kebijakan dan aturan dari pemerintahan dengan warga negaranya. Partai politik mampu menerjemahkan nilai dan kepentingan suatu masyarakat dengan proses akumulasi aspirasi dengan model *bottom-up* atau dari-bawah-ke-atas sehingga nilai dan kepentingan dari masyarakat tersebut dapat dituangkan menjadi bentuk rancangan undang-undang negara, aturan-aturan yang mengikat, dan selanjutnya menjadi program bagi masyarakat secara umum (Nurjaman, 2018).

Demi keberlangsungan demokrasi yang adil, Indonesia sebagai negara presidensial sangat membutuhkan partai politik sebagai penyeimbang dan agar lembaga eksekutif dapat memainkan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai

dengan ketetapan yang ada. Upaya pasti yang kiranya mampu dilakukan sebagai *check and balances* dalam parlemen, pemerintah membutuhkan kehadiran partai oposisi sebagai pengontrol atas kebijakannya (Lafuil & Umar, 2022). Kehadiran oposisi sejatinya adalah penjawantahan kedaulatan rakyat yang dimaksudkan dalam sebuah sistem demokrasi. Oposisi merupakan kekuatan di luar pemerintahan yang berdiri tegak menjaga kedaulatan rakyat agar tetap ada dan berfungsi. Dalam konteks inilah sehingga peran mereka yang menjadi oposisi atau di luar pemerintahan menjadi penting adanya, terkhusus untuk memastikan bahwa pemerintahan yang berjalan tetap berada dalam jalur kepentingan rakyat (Benartin & Paulus, 2022).

Kehadiran partai oposisi sangat diperlukan karena ketiadaan partai oposisi akan memberikan ruang leluasa dan pemerintah yang berkuasa menjadi otoriter, tanpa peduli adanya kritik, kontrol dan serta cenderung lebih pro kepada kelompoknya. (Meyer, 2012). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu partai yang ramai diperbincangkan dalam dunia politik dengan menjadi oposisi selama 2 periode terakhir. Oposisi menjadi ramai ke permukaan segera setelah mereka mengkampanyekan sikapnya untuk menjadi ‘satu-satunya’ partai oposisi di masa pemerintahan 2019-2024 oleh Mardani Ali Sera dengan hastag #KamiOposisi. Bibit oposisi PKS terhadap masa pemerintahan sekarang tidak muncul begitu saja. Hasil riset dari Sarah Soraya mengatakan bahwa bibit oposisi PKS mulai berkembang sejak masa Jabatan SBY di tahun 2009, PKS dinilai telah kritis dan menentang terhadap kebijakan meskipun berada dalam barisan koalisi di masa tersebut. PKS adalah partai

oposisi yang dikatakan cukup berani mengkritik dan vokal menyampaikan aspirasi dengan terang-terangan jika terdapat keganjalan bagi mereka dikala partai lain masih memilih di jalur yang aman (Soraya, 2021).

Konsistensi dari PKS juga patut diapresiasi karena telah kukuh pada pendiriannya menjadi partai oposisi setelah pemilu 2019 dikala Golkar, PPP, PAN yang berada di belakang Prabowo namun akhirnya berpindah haluan berkoalisi dengan Jokowi. PKS juga dikatakan memiliki harga diri yang dijunjung tinggi, yang menurut Firman Noor mengatakan menjadi oposisi telah membuat PKS menghindari paradoks politik karena apabila PKS bergabung koalisi, maka segala sikap yang sudah dikeluarkan oleh partai akan sia-sia dan hanya akan berdampak buruk pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR (Noor, 2016). Ada banyak pertimbangan yang kiranya membuat partai memilih menjadi koalisi ataupun oposisi, namun yang terpasti adalah ketika sebuah partai memilih jalan oposisi, maka mereka juga harus menanggung resiko internal apabila ketika mereka di luar pemerintahan, maka mereka tidak akan ada akses ekonomi yang bisa dikapitalisasi sebagai *resource* politik dalam jangka panjang dan siap-siap menjadi kelompok minoritas dalam kursi persidangan setidaknya hingga periode berikutnya (Soraya, 2021).

Analisis dari sikap PKS sebagai partai oposisi yang memiliki peran yang sangat krusial bagi jalannya pemerintahan selanjutnya menaruh perhatian dan pertanyaan bagi peneliti tentang bagaimana proses interaksi yang berlangsung dalam internal kelompoknya. Hal tersebut karena seperti yang kita ketahui bahwa hadirnya sikap dan strategi politik sebagai oposisi dari PKS tidak

terlepas dari bagaimana interaksi yang berlangsung dalam kelompoknya. Segala sikap yang khayalak luas ketahui sekarang tidak terlepas dari proses-proses dinamika dari partai tersebut, baik dari dinamika internal maupun dinamika eksternalnya, yang menurut Ratniah Solihah dalam risetnya menegaskan bahwa dinamika kelompok adalah yang sangat menentukan strategi dan peran politik yang dilakukan oleh partai (Solihah, 2016).

Wajah PKS yang konsisten dengan sikap oposisinya dan menjadi minoritas dalam menentukan arah dan kebijakan tentu memiliki beban tuntutan yang lebih besar dan harus mampu menghadirkan langkah-langkah nyata agar kehadirannya sebagai penyeimbang membuai hasil yang baik. Partai oposisi harus mampu mempengaruhi keputusan strategis pemerintah dengan menyelipkan aspirasi rakyat didalamnya yang dimulai dengan upaya-upaya kritik yang dapat memberi solusi nyata (Effendi, 2022). Di samping itu menjadi partai bersebrangan bagi PKS yang dari kuantitas kalah jauh dari formasi pemerintah dalam sistem multi partai seperti Indonesia juga memiliki *pressure* yang lebih tinggi karena segala sistem kebijakan disepakati atas suara terbanyak atau sistem voting. Sistem voting yang sifatnya “*making decision process involves by wider representation*” kiranya sangat memerlukan formasi yang seimbang atau paling tidak memiliki strategi yang kuat agar mereka bisa menjalankan fungsinya dengan baik (Chukwuemeka, 2020).

Berkaitan dengan uraian dan analisis di atas, peneliti mengangkat judul penelitian dengan pertimbangan dan ketertarikan untuk meneliti dengan mengangkat judul “DINAMIKA FRAKSI PARTAI KEADILAN

SEJAHTERA SEBAGAI PARTAI OPOSISI PADA MASA PEMERINTAHAN PERIODE 2019-2024” sebagai penelitian tugas akhir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana dinamika yang terjadi dalam tubuh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam konteks pertukaran sosial?.”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana dinamika yang terjadi dalam tubuh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam konteks pertukaran sosial.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Mampu menyajikan data melalui analisis fenomena sosial dengan pendekatan teori
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan sebagai upaya untuk pengembangan disiplin ilmu, khususnya sosiologi.

2. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan ataupun referensi terhadap disiplin ilmu sosiologi secara umum dan tentang dunia partai politik dan para stakeholder yang lainnya.

3. Manfaat pengalaman secara praktis

Bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan, memperluas wawasan berdasarkan dari apa yang ditemui di lapangan, serta memperluas relasi selama penelitian berlangsung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konsep

1. Fraksi-Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu partai yang berbasis Islam terbesar di Indonesia. Partai yang didirikan pada 20 April 2002 lalu ini merupakan partai politik yang lahir dari rahim reformasi serta gerakan dakwah Islam. Partai Keadilan Sejahtera dalam keyakinannya berkomitmen untuk berpegang teguh pada keadilan, nilai-nilai demokrasi, dan kesetaraan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera sejalan dengan nilai-nilai luhur Islam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mengutip laman website resmi dari Fraksi PKS, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memiliki sejumlah presiden partai sejak didirikan pertama kali, yakni dengan nama-nama sebagai berikut:

- a) Hidayat Nur Wahid (2002-2004)
- b) Tifatul Sembiring (2004-2009)
- c) Luthfi Hasan Ishaq (2009-2013)
- d) Anis Matta (2013-2015)
- e) Muhammad Sohibul Iman (2015-2020)
- f) H. Ahmad Syaikhu (2020 - Sekarang)

Kemudian merunut pada perjalanan historis sepanjang kiprahnya dalam perpolitikan Indonesia, PKS telah secara resmi mengikuti empat kali pemilihan

umum dengan jumlah perolehan suara yang kian meningkat hingga periode terakhir, yakni pada pemilu pertama di tahun 2004 dengan total 8.325.020 suara (7,34%) dengan 45 kursi DPR RI, Pemilu kedua di tahun 2009 dengan total 8.204.946 suara (7,88%) dengan 57 kursi DPR RI, kemudian pada pemilu 2014 memperoleh kenaikan 200rb suara dengan total 8.480.204 suara (6,79%) dan 40 kursi DPR RI dan di pemilu terakhir di tahun 2019 dengan 11.493.663 suara (8,22%) dan 50 kursi DPR RI.

Dalam aturan parlemen, Setiap Anggota Dewan diwajibkan untuk menjadi anggota salah satu fraksi. Fraksi berfungsi untuk mengkoordinasikan kegiatan anggotanya demi memaksimalkan efisiensi dan efektivitas kerja dari Anggota Dewan. Fraksi di sini juga memiliki tanggungjawab untuk mengevaluasi kinerja dari anggotanya serta melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada publik. Singkatnya, Fraksi PKS DPR RI adalah kelompok anggota DPR RI yang memiliki pandangan politik yang sejalan dengan visi dan misi Partai Keadilan Sejahtera, dan merupakan perjawantahan resmi dari Partai Keadilan Sejahtera di parlemen. Anggota DPR RI yang terpilih dari Partai Keadilan Sejahtera dalam setiap periode tersebut lalu kemudian diinstitusikan dalam sebuah kelompok yang disebut dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Fraksi PKS DPR RI). Fraksi ini dibentuk dengan tujuan untuk menselaraskan kepentingan Anggota Dewan yang beragam agar memiliki pandangan politik yang sejalan. Kehadiran fraksi memungkinkan agar Anggota Dewan mampu menjalankan tugas dan wewenangnya secara baik dan optimal.

Sama seperti kelompok sosial pada umumnya. Fraksi PKS DPR RI sebagai partai politik juga memiliki visi dan misi, mereka mengusung visi dan misi sebagai berikut.

a) Visi

Terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berkarakter, bermartabat, adil, dan sejahtera

b) Misi

- 1) Memperkuat dan mendorong lahirnya undang-undang yang melindungi kepentingan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 2) Mendorong politik anggaran yang berpihak kepada penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia yang handal.
- 3) Mendorong lembaga DPR menjadi penyeimbang kekuasaan eksekutif, dengan cara melakukan pengawasan yang kritis konstruktif dan kuat terhadap jalannya pembangunan.
- 4) Turut menjaga wibawa bangsa dan negara di mata internasional, melalui peran diplomasi yang menjadi bagian dari tugas DPR.
- 5) Meningkatkan kontribusi pemikiran strategis dalam pengokohan kehidupan berbangsa dan bernegara

Perjuangan politik Fraksi PKS DPR RI berfokus pada tiga isu utama, yakni:

- 1) Kebangsaan, Isu kebangsaan berkaitan dengan komitmen Fraksi PKS DPR RI untuk merawat, mengokohkan, dan menjalankan nilai-nilai dasar bangsa

dan negara Indonesia, yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.

- 2) Isu keumatan berhubungan dengan komitmen Fraksi PKS DPR RI untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam dan umat-umat agama lainnya, baik di Indonesia maupun belahan dunia lain, dengan berpegang pada prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan.
- 3) Isu kerakyatan berkorelasi erat dengan komitmen Fraksi PKS DPR RI untuk mengadvokasi kepentingan rakyat dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, tanpa diskriminasi, ketimpangan, maupun penyalahgunaan kekuasaan.

Adapun struktur Pimpinan Fraksi PKS DPR RI Periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. H. Jazuli Juwaini, MA.
- 2) Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.Psi.T.
- 3) Bendahara Fraksi PKS DPR RI. Habib Aboe Bakar Alhabsyi, S.E.
- 4) Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI
 - Dr. H. Sukamta | Wakil Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,
 - Dr. H. Mulyanto, M.Eng | Wakil Bidang Penelitian dan Pengembangan,
 - Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si | Wakil Bidang Kesejahteraan Sosial
 - H. Ecky Awal Mucharam | Wakil Bidang Ekonomi dan Keuangan
 - Drs. H. Adang Daradjatun | Wakil Bidang Kinerja

2. Hubungan Fraksi dengan DPR RI

Berorganisasi dalam negara dengan sistem demokrasi merupakan prasyarat mutlak bagi setiap dinamika perjalanan perjuangan politik. Seluruh aspek bangsa harus mengamini bahwa peranan partai politik sangat diperlukan dalam rangka perjalanan pelembagaan demokrasi. Dengan adanya organisasi, tentu dapat memberikan pengaruh bagi kepentingan bersama menjadi kuat keberadaannya saat menghadapi pihak lawan atau pesaing politik untuk mencapai suatu kekuasaan baik itu di eksekutif maupun di legislatif. Proses pelembagaan demokrasi tersebut pada dasarnya sangat ditentukan oleh pelembagaan partai politik sebagai satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dari sistem demokrasi itu sendiri. Olehnya, menurut Yves Meny dan Andrew Knapp bahwa *A democratic system without political parties or with a single party is impossible or at any rate hard to imagine* (Sistem demokrasi tanpa partai politik atau tidak ada satupun partai merupakan hal yang mustahil bisa maupun pada tingkat sulit untuk dibayangkan). (Meny and Andrew, 1998).

Sebagaimana partai memainkan peran strategisnya sebagai alat penghubung antara proses pembentukan kebijakan pemerintah (dalam arti luas) dengan warga negaranya maka pelembagaan politik ini tentu diperlukan adanya. Dalam konteks ini, Sebetulnya partai politiklah yang menentukan jalan atau tidaknya penyelenggaraan sistem demokrasi di suatu negara. Maka dari, partai politik juga dapat dikatakan pilar yang menjadi kekuatan lembaga dalam sistem politik yang demokratis (*the degree of institutionalization*). (Asshiddiqie, 2005).

Untuk kemudian memahami bagaimana hubungan fraksi dengan lembaga DPR RI, dapat dimulai dengan melihat sisi historis mengenai demokrasi langsung. Demokrasi langsung sebagaimana pengimplementasiannya di zaman Yunani Kuno sangatlah sulit dan rumit untuk dapat dipertahankan karena hal tersebut sesuai dengan keinginan J.J. Rousseau yang dengan tetap melanjutkan demokrasi langsung (*direct democracy*) dalam sistem kenegaraan di seluruh dunia yang setelah itu, mengalami sedikit perubahan yakni lahirnya lembaga perwakilan atau terkenal dengan istilah parlemen sebagai bentuk representasi dari ide tentang demokrasi perwakilan (*representative democracy*). (Budiardjo, 1991)

Perwakilan atau representation yang khalayak kenal sejak awal ialah perwakilan yang bersifat politik (*political representation*) di mana perwakilan rakyat yang ada di parlemen melalui partai politik memiliki wewenang untuk berbicara dan bertindak atas nama rakyat atau konstituen yang telah memilih partai tersebut. Selanjutnya, terdapat pandangan yang kiranya menjadi acuan keberlangsungan hubungan antara partai politik ini dengan DPR RI, yakni sebagaimana mengacu pada pendapat Padmo Wahjono yang mengungkapkan bahwa timbulnya konsep perwakilan tersebut disebabkan oleh tiga hal, sesuai dengan ide Jellinek sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan pengaruh berkembangnya hukum perdata di Romawi pada abad pertengahan yang menyebabkan lahirnya sistem perwakilan.

2. Lahirnya sifat dualistis pada abad menengah yakni adanya hak raja dan hak rakyat. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya perwakilan untuk mencerminkan hak dari rakyat.
3. Pada abad menengah dimana kondisi tuan-tuan tanah merupakan pusat kekuasaan. Timbulnya permasalahan dimana kekuasaan pada masa Romawi tersebut diperebutkan antar tuan tanah, di sisi lain sesungguhnya rakyat tidak pernah mendapatkan hak dalam perebutan kekuasaan (Wahjono, 1996).

Kemudian setelah itu, untuk mendukung pemahaman terkait konsep perwakilan, terdapat teori mengenai hubungan antara wakil rakyat dengan rakyat sebagai pihak yang memberikan mandat, teori ini disebut dengan teori mandat. Teori mandat ini dalam ilmu pengetahuan tentang kenegaraan kemudian dikenal lagi dengan beberapa istilah, yaitu:

- a) Teori Mandat Imperatif, wakil telah memperoleh instruksi dari yang diwakili, kewenangan si wakil sangat terbatas, yaitu hanya pada apa yang ditentukan oleh yang diwakilinya.
- b) Teori Mandat Bebas, wakil memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang akan mereka lakukan di lembaga perwakilan (DPR RI). Sehingga mereka tidak tergantung pada instruksi yang diwakilkan.
- c) Teori Mandat Representatif, rakyat dikatakan sebagai pemegang kedaulatan dan telah memiliki kesadaran politik untuk bernegara. Rakyat kemudian memberikan mandatnya kepada badan perwakilan secara keseluruhan yang kemudian mengeksekusi kedaulatan rakyat tersebut.

Dalam perkembangannya, teori mandate ini selanjutnya berhubungan dengan perkembangan sistem politik di Indonesia, yakni pada konstruksi sistem politik Orde Baru. Orde Baru yang mana beralaskan pada upaya untuk melakukan pemulihan kondisi keamanan dan menciptakan stabilitas politik di tahun 1965 hingga 1998. Presiden Soeharto yang saat itu kemudian mengelompokkan partai-partai berdasarkan ideologi untuk menjaga stabilitas sistem politik dengan menekan perbedaan ideologi yang ada di masyarakat, seperti ideologi Agamis dengan ideologi nasionalis. Misalnya sebelum dilaksanakannya pemilu tahun 1971, pemerintah saat itu melakukan upaya dalam rangka mengontrol lembaga DPR. Dimana dikatakan bahwa dari 460 kursi anggota DPR, 100 orang diantaranya ialah tidak dipilih melalui proses pemilu, melainkan diangkat dari unsur angkatan bersenjata atau ABRI. Kesepakatan politik saat itu kemudian melahirkan komposisi DPR dimana kesepakatan politik dilakukan antara pemerintah dengan partai-partai politik, yaitu Partai PDI, Partai PPP, dan Golongan Karya. (Legowo, 2005).

Kemudian membahas tentang hubungan partai politik dengan DPR RI berarti membahas tentang bagaimana partisipasi rakyat di lembaga perwakilan rakyat. Perlu diketahui bahwa dalam negara demokrasi seperti Indonesia, prasyarat perwujudan partisipasi rakyat salah satunya ialah dengan mengikuti pemilihan umum untuk memilih calon anggota DPR RI melalui partai politik yang telah lolos verifikasi sebagai peserta pemilu. Setelah itu, hubungan rakyat dengan DPR RI dalam konteks ketatanegaraannya ialah berbicara tentang hubungan antara wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya. Maka dari

sinilah hingga peran partai politik sebagai penghubung antara aspirasi rakyat dengan lembaga DPR RI dapat dilihat, yakni tentang bagaimana mereka berada di dalam lembaga DPR RI dilembagakan dalam fraksi-fraksi partai politik yang kemudian berfungsi sebagai wadah aspirasi masyarakat yang nyata. (Mubiina, 2020).

3. Fraksi PKS sebagai Organisasi Sosial

Dalam mengkategorisasikan Fraksi PKS ke dalam jenis organisasi sosial, maka Fraksi PKS tergolong dalam jenis organisasi formal. Organisasi formal sendiri menurut Angelo J. Gonzalez dalam Mark Bevir (2007) adalah komponen struktur organisasi sosial yang dirancang untuk mengarahkan dan mengatur perilaku anggota organisasi. Konsep formal ini digunakan karena di dalamnya terdapat prosedur, aturan, dan rutinitas resmi dari organisasi, serta jaringan hubungan otoritas yang menentukan peran antara anggota organisasi. Adapun standar operasional prosedur dan bagan dari organisasi formal pada dasarnya adalah peta hubungan otoritas formal (Bevir, 2007).

Lebih lanjut organisasi formal memiliki struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang jelas, serta tujuan-tujuan yang ditetapkan secara jelas. Dalam organisasi formal, struktur dijelaskan dalam bagan yang menjelaskan kekuasaan, hubungan-hubungan kerja, wewenang serta tanggung jawab antara pejabat dalam suatu organisasi. Hal tersebut sengaja direncanakan dan agar strukturnya bisa dilihat secara jelas. Organisasi formal juga harus memiliki tujuan organisasi atau sasarannya. Tujuan ini nantinya yang akan menjadi faktor yang mempengaruhi struktur organisasi yang akan dibuat.

Struktur organisasi sendiri merupakan mekanisme-mekanisme formal dengan bagaimana organisasi dikelola. Struktur organisasi menunjukkan sebuah jaringan atau kerangka dan susunan hasil pola tetap hubungan-hubungan diantara bagian-bagian atau posisi-posisi dan fungsi-fungsi atau pun orang-orang yang memiliki kedudukan, tanggung jawab serta tugas dan wewenang yang berbeda-beda dalam organisasi. Struktur meliputi unsur-unsur spesialis kerja, koordinasi, standarisasi, sentralisasi atau desentralisasi dalam perumusan kebijakan dan besaran satuan kerja.

4. Dinamika Kelompok

a) Konsep Dasar dan Fungsi Dinamika Kelompok

Dinamika kelompok berasal dari kata dinamika dan kelompok. Dinamika berarti interaksi atau interdependensi antara kelompok satu dengan yang lain, sedangkan Kelompok adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan mempunyai tujuan bersama. Dinamika merupakan ilmu yang mempelajari suatu gerak dari objek. Kemudian kelompok, menurut Smith, bahwa kelompok sosial merupakan satu unit yang terdiri atas beberapa orang yang mempunyai persepsi kolektif serta yang memiliki kemampuan untuk bertindak dengan cara yang serupa terhadap lingkungannya. (Huraerah & Purwanto, 2006).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kelompok adalah sekumpulan orang yang terdiri dari dua atau lebih yang melakukan interaksi satu sama lain yang tergabung dalam suatu aturan yang saling memengaruhi pada setiap anggotanya. Berdasarkan sudut

pandang tersebut, dapat juga dikatakan bahwa kelompok merupakan kumpulan individu yang terkumpul dalam satu unit yang terbentuk baik itu disengaja maupun merupakan sesuatu yang alami terbentuk, karena manusia sebagai makhluk sosial akan berinteraksi satu dengan yang lain sehingga membentuk kelompok-kelompok tertentu (Arifin, 2015).

Dalam perjalanan dari kelompok itu sendiri memiliki proses-proses atau pergerakan dari tiap interaksinya. Proses ini disebut sebagai dinamika kelompok. Dinamika kelompok sendiri merupakan aktivitas suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang berinteraksi atau memiliki hubungan psikologis secara jelas dan berlangsung dalam situasi yang dialami dalam kelompok. Keberadaan dinamika merupakan sebuah keharusan agar kelompok dapat dikatakan sebagai kelompok yang sehat dan berprogres. Adapun beberapa fungsi dari dinamika kelompok yaitu antara lain:

- a) Membentuk kerjasama saling dalam mengatasi persoalan.
- b) Memudahkan pekerjaan dalam kelompok.
- c) Mengatasi pekerjaan dengan efektif, cepat, dan efisien. Yakni melalui distribusi pekerjaan sesuai pada bagiannya masing-masing atau sesuai keahlian.
- d) Menciptakan iklim demokratis karena dengan dinamika maka memungkinkan setiap individu berinteraksi, memberikan masukan, dan memiliki peran yang sama dalam kelompok.

Dari penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa dinamika kelompok merupakan alat manajemen untuk menciptakan kerja sama kelompok yang optimal yang bertujuan agar pengelolaan kelompok menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif. Dinamika kelompok sebagai metode dapat menciptakan kesadaran setiap anggota kelompok dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kesadaran tersebut perlu diciptakan karena sebuah organisasi atau kelompok akan menjadi lebih efektif apabila memiliki satu tujuan yang jelas. Dinamika kelompok sebagai proses berupaya menciptakan situasi yang nyaman sedemikian rupa yang membuat seluruh anggota kelompok merasa terlibat dalam setiap tahap perkembangan kelompoknya dan juga setiap anggota merasakan peran dirinya sebagai bagian dari kelompok. Dengan demikian, setiap dari mereka dalam organisasi turut merasakan bertanggung jawab secara penuh bersama-sama terhadap pencapaian tujuan organisasi yang lebih luas (Ayu dkk, 2019).

b) Faktor-faktor dinamika kelompok

Kedinamisan kelompok sangat bergantung pada faktor penyebabnya (*puse factor*), yang melatarbelakangi terjadinya gelombang kedinamisan kelompok. Menurut Ayu dkk (2019), terdapat 6 *puse factors* dari dinamika kelompok yaitu:

1) Group Goals

Setiap organisasi harus memiliki sesuatu untuk diperjuangkan. Menetapkan tujuan bersama adalah prasyarat dan merupakan langkah

pertama yang penting untuk dikerjakan bersama oleh kelompok mana pun. Melibatkan anggota dalam proses ini akan memberikan mereka hak atas keputusan yang akan dibuat. Tujuan yang akan dicapai oleh kelompok harus relevan dengan tujuan anggota dan harus diketahui oleh semua anggota. Semakin lebar tujuan yang sama dari kumpulan beberapa anggota (A, B, C), maka semakin mencerminkan tujuan dari kelompok.

2) *Group Structure*

Struktur kelompok membahas tentang bagaimana kelompok mengatur jaring-jaring otoritas & wewenang pengambilan keputusan. Struktur kelompok berperan sebagai jaringan komunikasi guna menyampaikan instruksi informasi dari atas ke bawah atau penyampaian aspirasi dari bawah ke atas. Keruwetan dari jaringan ini juga menggambarkan keruwetan (*crowded*) sistem komunikasi dalam kelompok.

3) *Group task function*

Taks function kurang lebih merupakan pembagian tugas dari tiap anggota. Segala sesuatu yang harus dikerjakan oleh kelompok guna menciptakan task function yang ideal yaitu;

- a. Koordinasi tiap anggota
- b. Klarifikasi aturan jelas
- c. Kekompakan kepuasan anggota
- d. Penyebarluasan informasi yang merata
- e. Komunikasi yang jelas serta memiliki aturan yang lengkap

4) *Group Building and Maintenance*

Poin ini menjelaskan bagaimana agar kelompok dapat terpelihara dengan baik. Sejumlah hal yang harus ada dalam kelompok yaitu:

- 1) Pembagian tugas anggota merata sesuai fungsi dan kemampuannya
- 2) Kegiatan sesuai rencana serta aturan yang telah ditetapkan bersama
- 3) Norma kelompok tumbuh dan berkembang dalam pencapaian tujuan
- 4) Proses sosialisasi berjalan lancar sesuai norma yang berlaku
- 5) Penambahan anggota baru dan mempertahankan anggota lama
- 6) Memiliki fasilitas penunjang kegiatan kelompok yang memadai

5) *Group Atmosphere*

Suasana kelompok sangat menentukan seseorang dapat betah atau tidak betah menjadi anggota. Semakin betah anggota maka akan semakin tinggi kegairahan mereka untuk melakukan kegiatan kelompok selanjutnya. Suasana kelompok juga mendorong anggota untuk melakukan kerjasama dengan anggota lain dalam kelompok ataupun anggota dari kelompok lain.

6) *Group Pressure*

Desakan atau tekanan kelompok di sini bertujuan untuk menjaga ketaatan dari tiap anggota terhadap norma. Selain itu juga tekanan akan meningkatkan motivasi & kedisiplinan anggota, serta membangun kesatuan kelompok.

B. Teori Pertukaran Sosial

Penelitian yang mengkaji mengenai dinamika partai keadilan sejahtera sebagai partai oposisi di masa pemerintahan 2019-2024 akan menggunakan

gabungan antara teori pertukaran sosial Peter M Blau dan George Homans dalam menganalisis fenomena yang terjadi merujuk pada referensi Vicktor Patty (2014).

1. Konsep Teori Pertukaran Sosial

Peter M. Blau mengembangkan teori pertukaran sosial dengan berdasar pada analisis terhadap hubungan-hubungan antar individu dengan memusatkan perhatiannya pada analisis yang lebih luas. Oleh sebab itu, jika Homans bertolak dari petukaran sosial yang berskala mikro atau hubungan antar individu, maka Blau lebih fokus pada skala makro atau hubungan pada struktur sosial yang lebih kompleks seperti organisasi, kelompok atau negara. Blau dalam teori pertukarannya ingin menekankan bahwa setiap proses pertukaran tidak hanya berakhir pada hubungan-hubungan individu, tetapi lebih dan berlanjut dalam skala yang lebih besar kepada struktur yang lebih kompleks dan melampaui hubungan-hubungan yang hanya sekedar antar individu (Ritzer & Goodman, 2004)

Istilah "struktur mikro" digunakan pada keterkaitan antar individu di dalam kelompok, sedangkan "struktur makro" digunakan untuk menjelaskan bagaimana keterkaitan antar kelompok di dalam kelompok kolektif yang besar atau kelompok kolektif besar pada kelompok lain yang lebih besar lagi. Oleh sebab itu, elemen dari struktur makro dapat berupa struktur mikro ataupun struktur makro itu sendiri (Blau, 1964). Salah satu karakteristik utama yang membedakan struktur makro dengan struktur mikro yakni bahwa dalam proses sosial pada struktur makro diperantarai oleh nilai-nilai yang berlaku. Struktur

makro terbentuk dari kesalingterkaitan struktur sosial, dimana unsur pokok dari struktur mikro, yaitu kesalingterkaitan individu pada kontak sosial secara langsung. Hal tersebut merupakan kriteria pembeda dengan yang lain struktur mikro (Blau, 1964).

Dinamika struktur makro sangat bergantung pada beberapa macam kesalingtergantungan antara dorongan sosial, baik itu di dalam maupun di antara sub strukturnya. Adapun Jenis sub struktur pada sebuah komunitas menurut Blau (1964) dapat dibedakan sebagai berikut:

Pertama, sebuah komunitas yang memiliki populasi yang dapat dibagi menjadi golongan sosial merupakan dasar dari semua perlengkapan sosial, yang mengatur hubungan antar manusia serta orientasi mereka satu sama lain. *Kedua*, komunitas dalam sebuah kolektifitas terorganisir pada wilayah tertentu yang memiliki batas geografis yang menghindarkan mereka dari tumpang tindih pada setiap komunitas, juga pada bagian kecil hingga besar dari organisasi teritorial. *Ketiga*, kolektifitas terorganisir ialah asosiasi orang-orang dengan organisasi sosial tersendiri, yang bisa saja merupakan bentangan dari kelompok kecil dengan pertemanan informal hingga organisasi birokratis formal yang besar. *Keempat*, sistem sosial yang abstrak tidak hanya meliputi hubungan sosial pada kebersamaan yang spesifik tapi juga pada prinsip analitis organisasi, misalnya seperti ekonomi atau lembaga politik dari sebuah komunitas (Blau, 1964).

Bertolak dari empat faktor perbedaan sub struktur dalam komunitas di atas, maka Blau mendefinisikan bahwa komunitas sebagai unit keseluruhan yang dikoordinir dengan fitur khusus tertentu, khususnya dari daerah teritorial

dan memiliki batas geografis yang tidak saling tumpang tindih dengan komunitas lain (Blau, 1964). Meskipun dari proses-proses umum dari *attraction* (tindakan); *integration* (integrasi); *competition* (persaingan); dan *oposisi* merupakan bukti dari adanya pertukaran yang terjadi di antara *macrostructure*, namun Blau melihat beberapa perbedaan dasar antara pertukaran dan aspek-aspek makrostruktur, diantaranya:

- 1) Dalam pertukaran yang lebih kompleks antara struktur makro, makna nilai-nilai bersama atau *shared value* menjadi meningkat melalui beberapa nilai pertukaran tidak langsung di antara struktur makro yang termediasi.
- 2) Jaringan yang dipertukarkan di antara *macrostructure* dilembagakan. Meskipun sejatinya dalam kehidupan sosial sebuah pertukaran terjadi secara spontan, biasanya terbentuk persetujuan secara historis yang membatasi proses pertukaran dasar dari *attraction*, *differentiation*, *competition*, *integration* atau bahkan pertentangan antara unit kolektif.
- 3) *Macrostructure* sendiri merupakan produk yang melampaui dari hanya sekedar proses pertukaran dasar, sehingga analisis dari *macrostructures* memerlukan analisis yang lebih dari satu level organisasi sosial (Turner, 1997).

2. Dari Pertukaran Individu ke Pertukaran Kelompok.

Dengan mengutip Simmel, Blau menjelaskan bahwa interaksi sosial berkaitan dengan berbagai macam bentuk dan mampu berkembang berbagai macam keinginan individu sehingga mendorong mereka untuk bisa mengembangkan unit sosial mereka, yang mana mereka bisa menyadari

keinginan seperti: awet atau sementara, sensual atau ideal, sadar atau tidak, secara kebetulan mendorong atau secara konteks tujuan mengajak (Blau, 1964).

Ketika terjadi kontak sosial antara individu dalam kelompok atau dalam suatu komunitas, Interaksi sosial yang berlangsung dapat diamati dalam ruang sosial dan waktu. Oleh karena itu, ruang sosial dan waktu menjadi sarana untuk mengamati dan melihat bagaimana proses interaksi sosial, sedangkan untuk tindakan atau aksi dari individu, lebih memberi makna dari hubungan sosial tersebut. Dengan demikian sebuah aksi dapat dimaknai sebagai proses keadaan sosial dalam tingkat lanjut, sebagaimana bayangan dari arti subyektifitas yang berkaitan dengan keadaan tersebut oleh tindakan atau aksi individu (atau beberapa), yang membutuhkan sikap individu lain, atau dengan kata lain, aksi berkaitan dengan penyebabnya. Aksi sosial atau tindakan antar individu atau beberapa individu dalam kelompok tentu dilatarbelakangi oleh dua hal mendasar yakni: terbentuknya nilai-nilai sosial bersama yang menjadi struktur sosial yang kompleks, dan ketertarikan sosial yang dapat memberikan perbedaan status dalam struktur sosial. Dalam pandangan pertukaran sosial, interaksi tersebut didorong oleh ketertarikan antara individu yang selanjutnya menghasilkan *cost* dan *reward* (Blau, 1964).

Kekuatan dari ketertarikan sosial selanjutnya memicu pertukaran sosial. Proses ketertarikan tersebut yang menjadi dasar perkembangan integrasi sosial dalam sebuah kelompok. Semakin besar ketertarikan individu terhadap individu lain dan juga terhadap kelompok diakibatkan ketertarikan melekat mereka terhadap hubungan tersebut menimbulkan identifikasi yang sama, maka akan

semakin padu pula kelompok itu. Ketertarikan dari seseorang anggota baru kepada sebuah kelompok dikarenakan hadirnya kesadaran diri yang bersangkutan atau keinginan diri akan tentang penerimaan sosial tertentu. Karena setiap individu dibina oleh keinginan dan kesadaran akan penerimaan, maka interaksi akan memunculkan proses kompetitif, dan diferensiasi sosial yang berkembang dalam persaingan. Proses bersaing dan diferensiasi akan meningkatkan kebutuhan ikatan sosial yang suportif. Identifikasi anggota terhadap kelompoknya memenuhi ketertarikan yang merupakan dasar solidaritas sosial. Namun melalui hubungan tersebut akan muncul diskriminasi dan generalisasi baik terhadap individu maupun kelompok. Oleh karena itu menurut Blau, ada dua hal yang akan muncul yaitu:

“Pertama, diskriminasi berada diantara individu yang menarik dan orang-orang yang tidak menarik, generalisasi berasal dari pengalaman yang menyenangkan hingga harapan dimana pengalaman lain yang berhubungan dengan dia akan memuaskan juga, dan ini merupakan kedekatan intrinsik baginya. Kedua, diskriminasi berada pada orang dan obyek atau aktivitas yang menyenangkan, generalisasi dikarenakan obyek mirip dengan orang lain yang juga akan memberikan kepuasan dan kemauan ekstrinsik pada keuntungan yang didapat dari sumber manapun. Hal ini kemudian pula memunculkan empat faktor penting dalam struktur sosial yaitu, integrasi, diferensiasi, organisasi, dan oposisi. Integrasi dan diferensiasi muncul dalam pertukaran sosial tanpa adanya desain yang eksplisit, sementara organisasi dan oposisi merupakan hasil usaha terorganisir yang difokuskan pada sasaran dan idelisme kolektif.” (Blau, 1964) dalam Patty (2014)

Secara umum, pertukaran secara tidak langsung merupakan karakteristik dari struktur kompleks pada komunitas luas. Hal tersebut karena kontak langsung antara sebagian besar anggota kepada komunitas yang lebih luas tidaklah mungkin, namun hubungan diantara mereka mempersatukan mereka kepada sebuah struktur sosial, melalui nilai-nilai sosial sebagai

perantara yang memediasi hubungan serta transaksi yang tidak langsung. Nilai-nilai tersebut kemudian selanjutnya yang memunculkan solidaritas dan integrasi sosial dalam sebuah struktur sosial maupun pada sub struktur sosial. Ketika nilai-nilai tertentu tidak terlembagakan dalam sebuah sistem sosial, maka hubungan pertukaran tidak akan dipertimbangkan dalam hubungan timbal balik oleh mereka yang telah menginternalisasikan nilai-nilai ini. Bagi mereka yang telah menginternalisasi nilai-nilai yang tidak dilembagakan, bisa saja ada persepsi bahwa pertukaran yang adil telah dilanggar. Kesadaran ini kemudian akan mengarahkan mereka untuk menetapkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip keadilan dalam kelompok, konsensus ini pada akhirnya akan melahirkan sanksi negatif bagi mereka yang melanggar norma-norma pertukaran yang adil (Blau, 1964) dalam (Patty, 2014).

3. Memahami Pertukaran Sosial dalam Struktur Kekuasaan

Kekuasaan oleh Weber didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya terhadap orang lain meskipun ada perlawanan. Ada dua tipe kekuasaan menurut Weber, yaitu: dominasi atas orang yang bergantung pada kapasitas untuk mempengaruhi kepentingan mereka, dan dominasi yang bergantung pada otoritas, yaitu pada kekuasaan untuk memerintah serta tugas untuk patuh (Wrong, 1970). Ringkasnya, sebuah kekuasaan yang seimbang akan membutuhkan legitimasi. Namun perbedaan dari kekuasaan akan menimbulkan potensi konflik. Potensi tersebut sering ditangguhkan oleh serangkaian kekuatan untuk menunjukkan perubahan

otoritas kekuasaan, yang mana bawahan menerima legitimasi pemimpin sebagai tuntutan kepatuhan atau ketaatan.

Ada empat hal yang kemungkinan akan terjadi ketika pertukaran tak seimbang dalam satu kelompok di dalam asosiasi, yaitu yang pertama, orang dapat memaksa orang lain untuk menolongnya; kemudian kedua, mereka akan mencari sumber yang lain untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka; ketiga, mereka mampu bertahan hidup terus tanpa memperoleh apa yang ia butuhkan; dan keempat, mereka bisa takluk kepada orang-orang yang memberikan bantuan kepada mereka (Raho, 2007). Hal ini selanjutnya akan menciptakan kekuasaan atas yang kuat dan lemah, atau dalam suatu struktur sosial yang disebut pimpinan dan bawahan. Oleh sebab itu, Blau dalam (Patty, 2014) mengatakan bahwa;

“Jika salah satu dari empat kondisi tersebut tidak tersedia bagi mereka, maka para individu yang ingin mendapatkan keuntungan namun tidak memiliki pilihan lain harus tunduk kepada kekuasaannya sebagai pendorong bagi orang tersebut untuk menyediakan keuntungan ini” (Blau, 1964).

Salah satu faktor yang juga dianggap penting untuk melegitimasi kekuasaan ialah dengan kepemimpinan yang memiliki **otoritas atau kewenangan**. Tetapi otoritas seorang pemimpin ditentukan juga oleh kepatuhan dari mereka yang dipimpin. Kepatuhan mungkin saja bisa dipaksakan melalui kekuasaan yang cukup, akan tetapi persetujuan yang berkaitan dengan seberapa besar kekuasaan tidak dapat dipaksakan. Hal

tersebut karena akan menyebabkan timbulnya perlawanan, agresi dan oposisi yang berkemungkinan memicu jatuhnya kepemimpinan seseorang, dan sebaliknya, persetujuan kolektif akan melegitimasi kepemimpinan. Maka dari itu menurut Blau, Hubungan yang dikatakan stabil sangat bergantung pada kekuasaan terhadap orang lain, serta pengakuan yang sah mengenai kekuasaan tersebut. Dilema akan kepemimpinan dikarenakan oleh pencapaian atas kekuasaan dan pencapaian pengakuan sosial yang akan berakibat pada tidak seimbangnya permintaan pada seseorang (Blau, 1964).

Hal yang paling penting untuk menjaga kestabilan suatu kekuasaan adalah dengan memiliki kemampuan untuk memberikan sesuatu yang menguntungkan kepada bawahan. Semakin sedikit hal yang diharapkan untuk dicapai dari seorang pemimpin dengan kekuasaan yang dimilikinya, maka akan semakin sedikit kekuasaan yang akan cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan akan semakin sedikit pula tuntutan yang akan dia buat pada hal yang berberkaitan dengan kekuasaannya (Johnson, 1990).

Pada sisi lain, ketika seseorang pada posisi subordinat dan agar dia tidak bergantung pada orang lain, maka strategi menerima pelayanan atau pemberian dari orang lain atau menolak akan digunakan sebagai bagian dari strategi penolakan diri dari potensi penguasaan orang lain, ataupun melakukan pelayanan yang imbang kepada orang yang memiliki posisi yang sama sebagai potensi investasi kuasa (Raho, 2007) dalam (Patty, 2014).

4. Nilai dan Norma Menurut Blau

Nilai dan norma dalam kehidupan masyarakat adalah dasar yang "Menggerakkan" perilaku seseorang ataupun perilaku sosial. Dengan demikian, nilai dan norma berperan sebagai dasar pertukaran sosial dalam aspek yang melebihi batas kontak sosial secara langsung. Dengan kata lain, nilai dan norma dijadikan sebagai penengah antara transaksi sosial langsung dan tidak langsung dalam konteks ruang sosial makro dan mikro. Sebab apabila norma menjadi alat pertukaran antara individu dan masyarakat maka nilai akan menjadi alat pertukaran antara kelompok dan kelompok ataupun antara kolektivitas dan kolektivitas (Raho, 2007).

Nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat menurut Blau menjadi suatu kebiasaan yang dilestarikan dari generasi ke generasi, sekalipun di dalamnya terdapat perubahan atau modifikasi seiring perkembangan zaman. Hal tersebut karena menurut Blau, nilai dan norma membentuk kehidupan sosial (*social life*) di masyarakat dan pola-pola sosial (*social patterns*) yang terjadi pada tatanan kelompok sosial tertentu. Nilai sosial sendiri merupakan penghargaan yang diberikan masyarakat kepada segala sesuatu yang dianggap memiliki daya guna fungsional bagi kemajuan hidup bersama (Raho, 2007). Menurut Hendropuspito, adapun kriteria yang digunakan untuk memberi penghargaan ialah daya guna fungsional yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Yakni seperti Orang, barang atau apapun bentuknya maka harus berfungsi dengan baik dalam struktur dan system masyarakat tertentu, hal tersebut karena apabila daya guna fungsional tersebut disfungsi atau tidak

fungsional dalam struktur dan sistem masyarakat, maka bentuk penghargaan terhadapnya juga akan berpengaruh pada penilaian masyarakat.

Standar normatif dalam kehidupan sosial adalah hal yang sangat penting untuk meminimalisir hal yang menyimpang. Ketiadaan norma-norma sosial yang mengatur larangan kekerasan dan penipuan, maka akan berdampak pada pertukaran sosial yang tidak berfungsi sebagai mekanisme pengaturan diri sendiri (*Self-regulating mechanism*) di dalam batas norma-norma yang ada. Di sisi lain, sumber daya manusia dan kekuasaan merupakan hasil keunggulan kompetitif yang didapatkan dalam pertukaran sosial memberikan ruang untuk mengeksploitasi orang lain. Menurut Rapoport (1960: 173) yang dikutip oleh Blau mengatakan bahwa: Manifestasi dramatis tentang pentingnya norma sosial diperoleh dalam berbagai situasi sosial dimana untuk kepentingan semua pihak, tidak hanya sebagian yang perlu dilindungi dengan norma sosial yang ada karena keinginan dari kepentingan pribadi tanpa adanya batasan normatif bisa mengalahkan kepentingan pribadi dari seluruh pihak yang terlibat (Blau, 1964) dalam (Petty, 2014).

Berdasarkan uraian di atas, maka kehadiran norma sosial diperlukan untuk melarang tindakan seorang individu yang menyimpang dan memperoleh keuntungan dengan mengorbankan kepentingan kelompok. Dengan kata lain, apabila terjadi pelanggaran kepada etika moral yang ada, maka kepentingan individu akan lebih menonjol dibanding kepentingan kelompok. Hal tersebut akan merubah *reward* dan *cost* sebagai suatu alternatif dalam perilaku sosial. Sehingga diperlukan norma yang mampu difungsikan sebagai landasan

pemberian sanksi bagi yang menyimpang, baik itu sanksi sosial ataupun sanksi hukum.

"*Interpersonal attraction*" (tindakan interpersonal) dari pertukaran dasar yang terjadi antara individu bisa digantikan oleh "*Shared value*" atau nilai-nilai Bersama pada tingkatan makro. Nilai-nilai tersebut dapat dikonseptualisasikan sebagai "*Media of social transactions*" atau media transaksi sosial yang memberikan standar baku untuk menuntun pertukaran kompleks tidak langsung antara struktur sosial dengan anggotanya (Turner, 1997). Untuk memediasi dari pertukaran tidak langsung baik itu antara kelompok-kelompok maupun organisasi-organisasi, "*Shared value*" menyediakan tolak ukur untuk menilai yakni (a) *expected reward/reward* yang diharapkan, (b) *reciprocity*/timbal balik, dan (c) *fair exchange*/pertukaran yang adil (Turner, 1997) dalam (Petty, 2014).

Konsensus atau legitimasi persetujuan bersama kemudian menjadi standar keadilan dalam pertukaran sosial dan norma-norma sosial lainnya, seperti menetapkan tujuan oposisi dan nilai sosial lainnya yang menegaskan individu dan kelompok sasaran berusaha untuk mencapainya. Lumrahnya norma dan nilai yang disepakati berperan sebagai perantara penghubung untuk transaksi-transaksi sosial dan sebagai media kehidupan sosial. Dengan demikian menurut Blau, norma dan nilai sosial tersebut memberikan ruang untuk terjadinya pertukaran sosial tidak langsung, mengatur proses integrasi sosial dan diferensiasi dalam struktur sosial yang lebih kompleks serta perkembangan organisasi sosial maupun reorganisasi di dalamnya (Blau, 1964).

5. Nilai sebagai Media Transaksi Sosial

Dalam upaya memahami fungsi dan peran nilai dalam teori pertukaran sosial, Blau kemudian bertolak dari proposisi nilai menurut Homans. Proposisi nilai menurut Homans yang dikutip dari Bernard Raho adalah: semakin tinggi nilai dari tindakan seseorang, maka semakin besar pula kemungkinan orang tersebut melakukan tindakan yang sama (Raho, 2007). Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa secara umum nilai digunakan sebagai media pertukaran sosial yang memperluas tujuan interaksi sosial serta struktur hubungan sosial dalam ruang dan waktu. Nilai sosial yang disepakati sebagai dasar untuk memperluas jaringan pertukaran sosial serta jangkauan pertukaran sosial secara langsung dan untuk memelihara system sosial dan strukturnya melebihi waktu hidup manusia.

Selanjutnya nilai standar dapat dikatakan sebagai media kehidupan sosial dalam dua definisi: yang pertama bahwa konteks nilai adalah perantara yang membentuk hubungan sosial, dan yang kedua adalah nilai-nilai bersama merupakan hubungan perantara asosiasi sosial dan pertukaran dalam skala yang lebih luas. Dalam hal tersebut, Fraksi PKS sebagai perpanjangan dari PKS memiliki tujuan baik itu visi, misi atau tujuan lainnya yang dianggap bernilai oleh partai. Tujuan yang kemudian menjadi “nilai” tersebut menjadi dasar yang membentuk struktur hubungan sosial bagi para anggota di dalam Fraksi terjalih. Selanjutnya nilai-nilai yang diyakini dalam Fraksi kemudian menjadikannya sebagai media perantara antara Anggota legislatif (Aleg) kepada pertukaran yang lebih luas. Artinya, Anggota legislatif yang tergabung dalam Fraksi PKS

memiliki nilai-nilai yang mereka yakini bermanfaat kepada mereka baik secara personal maupun secara kelembagaan kemudian menjadi media perantara bagi mereka untuk pertukaran yang tinggi.

Namun sebelum itu perlu juga diketahui bahwa proses pemaknaan nilai dalam Lembaga Formal seperti Fraksi telah diatur sedemikian rupa. Proses pertukaran yang berjalan telah diatur dalam prosedur keanggotaan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagaimana definisi Fraksi menurut DPR RI bahwa Fraksi adalah sekumpulan anggota yang memiliki pemikiran dan tujuan yang sepaham, maka seluruh Anggota legislatif segera setelah bergabung menjadi bagian dari PKS maka seluruh visi, misi, tujuan atau standar “nilai” yang menjadi media dalam pertukaran sosial telah dipenuhi yang kemudian relevan untuk dianalisis sebagai satu kesatuan individu yang mengalami pertukaran dalam sebuah organisasi.

Dalam hubungan dengan nilai-nilai sosial, maka ada empat nilai dasar menurut Blau yang sangat mempengaruhi pertukaran sosial dan ada tiga yang akan digunakan sebagai alat analisis, yakni: nilai universal, nilai partikularistik, nilai dan legitimasi. Nilai-nilai universal sebagai diferensiasi dan media pertukaran; nilai-nilai partikularistik digunakan sebagai media solidaritas; dan nilai-nilai legitimasi sebagai media organisasi (Blau, 1964).

C. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian berkaitan dengan judul “Dinamika Humas Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sebagai Partai Oposisi pada Masa Pemerintahan

Periode 2019-2024” maupun yang masih berkaitan dengan pembahasan yang terdapat dalam judul penelitian diantaranya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Penelitian Relevan

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sarah Soraya, Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2021)	“Konsistensi Partai Keadilan Sejahtera di Luar Pemerintahan Joko Widodo pada Periode 2014-2019 dan 2019-2024”	Metode Penelitian: Kualitatif deskriptif Hasil Penelitian: Penelitian yang ditulis oleh Sarah Soraya menyimpulkan bahwa meskipun oposisi kawan-kawan di periode 2019 seperti Gerindra, Golkar, PAN, PPP sudah tidak berada dalam satu gerbong lagi. Sikap tegas dalam menentukan sikap politiknya untuk tetap konsisten beroposisi. Sikap tersebut PKS sebagai oposisi di periode 2014-2019 dan periode 2019-2024 ialah terjadinya peningkatan suara yang signifikan, PKS juga lebih leluasa dalam menyatakan pendapatnya dalam parlemen karena berada di luar gerbong pemerintahan.

			<p>Kedua hal tersebut dikatakan menguntungkan bagi partai.</p> <p>Kemudian fungsi check and balance juga terjaga selama mereka menjadi oposisi.</p>
2.	<p>Cecep Suryana, Dosen Fakultas Dakwah Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2021)</p>	<p>“Politik sebagai Dakwah: Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera”</p>	<p>Metode Penelitian: Fenomenologi</p> <p>Hasil Penelitian: Hasil penelitian dari Cecep Suryana menjelaskan bahwa politik yang dikerangka PKS sebagai Gerakan dakwah Islam menjadi karakter perjuangan PKS yang difokuskan pada konsep dakwah dan bagaimana aktivitas komunikasi politik yang dijalankan. Dalam tulisannya menunjukkan bahwa konsep dakwah PKS dikatakan banyak mendapat inspirasi dari pemikiran dakwah Hasan Al-Banna yang bersifat universalis dalam arti bahwa dakwah harus mampu menjadi jawaban praktis atas semua persoalan sosial-kemanusiaan, tidak hanya bagi umat Islam. Oleh karena itu, politik</p>

			tidak lain merupakan salah satu medium dakwah. Sementara itu dikatakan pula bahwa pola komunikasi politik yang dijalankan oleh PKS dikategorikan pada dua kategori besar yakni; komunikasi terhadap kader yang pada umumnya melalui kajian-kajian Islam dan politik; dan komunikasi dalam konteks suksesi atau menghadapi perhelatan pilkada yang biasanya dilakukan melalui kegiatan bakti sosial, pengajian umum dan sosialisasi secara <i>door to door</i> .
3.	Sri Melan Sedriyani, Mahasiswi Universitas Gadjah Mada (2021)	Partai Keadilan Sejahtera di Tengah Pusaran Tren Penurunan Anggota Partai: Bagaimana Cara Mereka Bertahan?	Metode Penelitian: Kualitatif deskriptif Hasil Penelitian: Penelitian dari Sri Melan menunjukkan bahwa tren penurunan anggota partai yang terjadi di Eropa juga turut terjadi di PKS, namun hal tersebut tidak berdampak pada perolehan suara dari PKS yang

			justru meningkat dari periode ke periode selanjutnya.
--	--	--	---

Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yakni, dari 1) Sarah Soraya mengkaji bagaimana konsistensi PKS sebagai oposisi sedangkan penelitian ini meneliti bagaimana dinamika dalam pertukaran sosial dari Fraksi PKS. 2) Penelitian dari Cecep lebih focus kepada cara komunikasi dari PKS dengan memanfaatkan dakwah sedangkan penelitian ini berfokus kepada motivasi dari setiap interaksi di Fraksi PKS, seperti apa yang diharapkan, pertukarannya apa, prosesnya apa dan hasilnya bagaimana. dan 3) Penelitian dari Sri menjelaskan bagaimana kondisi PKS di tengah tren penurunan anggota partai/kader partai dan menjelaskan bagaimana mereka bertahan. Sedangkan penelitian ini lebih menjelaskan bagaimana pertukaran sosial yang terjadi antar anggota dari Fraksi PKS.

D. Kerangka Pikir

Politik memiliki ranah yang cukup luas namun pada dasarnya dalam proses-proses politik itu sendiri memiliki pola yang sama, yakni “interaksi”. Interaksi kemudian diperlukan menjadi satu kesatuan yang terlembaga selanjutnya memiliki tujuan berupa visi misi yang jelas. Dalam konteks berkelompok, politik tak bisa dilepaskan dari partai politik sebagai perantara aspirasi dari masyarakat hingga ke pimpinan pusat. Partai politik memiliki peranan penting karena daripadanya sebuah pengaruh sebuah kebijakan

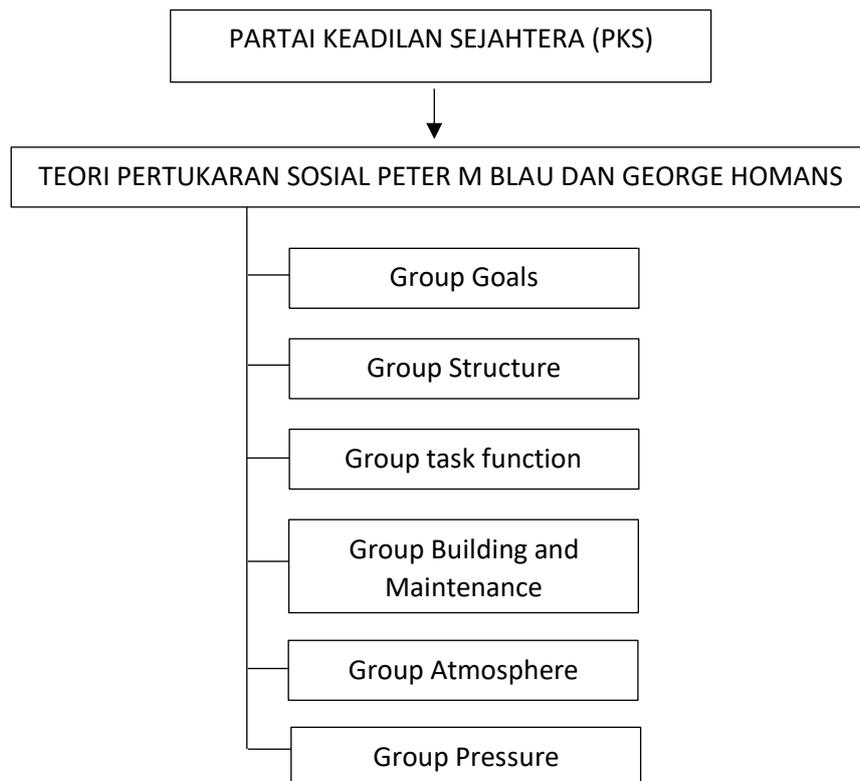
dilaksanakan bergantung pada seberapa besar pengaruh mereka dalam proses keputusan.

Kelembagaan partai amat penting ditelusuri secara kajian dinamika kelompok, terutama Fraksi dalam hal ini memiliki peran yang penting sebagai perwakilan partai di parlemen. Hadirnya fakta politik tentu tak terlepas dari interaksi-interaksi yang dijalankan dalam internal PKS itu sendiri yang membuat partai menjadi continue atau berkembang hingga sekarang dengan sikap oposisinya. Mengutip dari Simmel, Blau mengatakan bahwa sebuah interaksi sosial memiliki berbagai macam bentuk dan dapat berkembang sehingga mendorong mereka untuk mengembangkan unit sosial mereka dimana mereka dapat menyadari keinginan seperti: sensual atau ideal, awet atau sementara, sadar atau tidak sadar, secara kebetulan mendorong atau secara teleologis mengajak. (Blau, 1964).

Sejalan dengan topik pembahasan, PKS sebagai partai politik juga memiliki dinamika perjalanan panjang sebagai partai dengan sikap oposisinya. PKS memiliki visi, misi, struktur kelompok dll yang setiap elemen tersebut memiliki makna tersendiri dalam menentukannya dalam kaca mata pertukaran sosial. Anggota kelompok atau Individu memiliki tujuan sendiri, dan DIPADUKAN dengan tujuan kelompok (PKS) sehingga menciptakan nilai-nilai bersama yang mnejadi sikap, struktur, strategi, serta fakta politik dari PKS sebagai oposisi.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian seperti di bawah ini:

BAGAN KERANGKA KONSEP



Gambar 1. Skema Kerangka Konsep

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan batasan tentang definisi yang sajikan peneliti terhadap sebuah variable-variabel atau konsep yang hendak diukur dan digunakan sebagai analisis dalam penelitian. Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah:

Dinamika merupakan konsep yang digunakan untuk mendefinisikan gerak dari suatu obyek, dalam hal ini dinamika yang dimaksud merupakan **Dinamika kelompok** yang menganalisis hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan yang lain dan berlangsung dalam situasi yang dialami (Ayu dkk, 2019).

Seperti yang diketahui banyak ilmu sosial yang mampu menganalisis sebuah hubungan psikologis melalui beragam perspektif, salah satunya adalah melalui **teori pertukaran sosial**. Teori pertukaran sosial adalah teori yang menjelaskan interaksi-interaksi transaksional individu dengan individu yang lain dalam kelompok atau dengan kelompok lain yang lebih luas dengan harapan-harapan pertukaran tertentu.

Setiap kelompok memiliki faktor yang menyebabkan mereka bergerak dinamis, merujuk pada enam puse factors dari Ayu dkk (2019). Terdapat *group goals, group structure, group task and function, group atmosphere, group pressure dan group bulding maintenance*.

Group goals merujuk pada sesuatu untuk diperjuangkan dengan melibatkan anggota dalam proses memberikan mereka hak atas partisipasi. **Group Structure** adalah bagaimana sebuah kelompok membahas tentang jaring-jaring otoritas & wewenang pengambilan keputusan. Struktur kelompok berperan sebagai jaringan komunikasi guna menyampaikan instruksi informasi dari atas ke bawah atau penyampaian aspirasi dari bawah ke atas. **Group task function Taks** ialah pembagian tugas dari tiap anggota yang memiliki koordinasi serta klarifikasi aturan jelas. **Group Building and Maintenance**

adalah yang akan menjelaskan bagaimana agar kelompok dapat terpelihara dengan baik. *Group Atmosphere* adalah jalan untuk mengetahui kenyamanan dan situasi yang sedang berlangsung dalam lembaga, semakin baik suasana dalam proses kelompoknya, maka semakin ia mengharapkan pertukaran yang lebih. Dan *Group Pressure* atau tekanan kelompok di sini bertujuan untuk menjaga ketaatan dari tiap anggota terhadap norma, meningkatkan motivasi & kedisiplinan anggota, serta membangun kesatuan kelompok